

# RENCANA KERJA (RENJA) 2021 DINAS KETENAGAKERJAAN



Jl. H. A. Mappanyukki No. Telp./Fax 0481 22457

Email. [disnakerkabbone@gmail.com](mailto:disnakerkabbone@gmail.com)

WATAMPONE



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2020 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Dalam Rencana Kerja ini juga dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi dan program berbasis pada analisis lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang dibidang ketenagakerjaan. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahun 2021 ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2021 juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Untuk tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone merencanakan 8 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 42 kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp.4.243.114.690.

Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bone yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bone.

Watampone, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Bone



Srs. ASISWA  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
: 19640830 199205 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum .....	3
1.3.Maksud dan Tujuan .....	4
1.4.Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>24</b>
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	27
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>32</b>
4.1. Rencana Program Kegiatan.....	32
4.2. Dana Indikatif .....	34
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>43</b>



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone s/d Tahun 2020 (Triwulan 1) .....	7
Tabel 2	Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2020 (Triwulan 1 )- Dinas ketenagakerjaan kab. Bone .....	11
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone hingga Tahun 2020 (triwulan 1 ) dan Proyeksi Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....	13
Tabel 4	Rencana Program Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Thun 2021 dan perkiraan maju 2022 .....	17
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2021 – Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone .....	30
Tabel 6	Rumusan Rencana Program & Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 – Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone .....	40



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perluasan kesempatan kerja banyak tergantung kepada masalah pertumbuhan Ekonomi, moneter, fiskal dan investasi.

Salah satu masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Ketenagakerjaan adalah terbatasnya lapangan kerja dan angkatan kerja yang setiap tahunnya meningkat serta lapangan kerja sangat terbatas demikian pula penganggur terbuka dan setengah penganggur meningkat dan tingkat keterampilan maupun pendidikan yang rendah .

Dan oleh karenanya , bahwa dengan tersedianya jumlah tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang ditunjang dengan sumber daya ekonomi yang dapat dioptimalkan dapat membuka penyediaan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat baik yang bersifat permanen maupun temporer dalam rangka pemberdayaan sumber daya masyarakat melalui kegiatan – kegiatan ekonomi yang memiliki nilai produktif .

Berkaitan dengan hal tersebut , bahwa untuk mengatasi masalah ketenakerjaan dan ketransmigrasian telah disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2021 yang merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dala waktu satu tahun . Dalam penyusunan Rencana Kerja memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja SKPD dan Kecamatan serta Stakeholder

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah



(RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui koordinasi antar instansi Pemerintah Kab. Bone dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya



terhadap RKPD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian/Lembaga terkait.

Hasil akhir perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap tahun anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Perangkat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019
14. Peraturan Bupati Bone Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2021;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

- Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman , arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang diharapkan mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan , diantaranya ikut mendorong tercapainya sasaran dan terciptanya hubungan kerja yang harmonis .
- Menyediakan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai masukan untuk menyusun RKPD,KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan yang terukur .

#### B. Tujuan

Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 bertujuan :

- Terumuskannya Visi – visi , tujuan , sasaran program serta kegiatan untuk mendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian .
- Menjamin tersusunnya rencana program kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum khususnya dalam upaya peningkatan tenaga kerja lokal yang terampil untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha
- Untuk memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik laporan Realisasi Keuangan , Laporan Bulanan serta LAKIP dan LKPJ Bupati .



#### 1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **Bab 1   Pendahuluan**

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

##### **Bab 2   Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

##### **Bab 3   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

##### **Bab 4   Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Menyajikan gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

##### **Bab 6   Penutup**

Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat *Daerah* pada Tahun Perencanaan.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2021 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2019 Perangkat Daerah dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2020.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja hingga tahun 2020, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone hingga tahun 2020 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2020, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :



Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone s/d Tahun 2020 (Semester I)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	Urusan Wajib									
1 14	Tenaga kerja									
1 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan setiap Tahun Anggaran	100 %	97,23	100 %	100 %	100 %	100 %	65,85	100 %
1 14 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	94,93	100 %	100 %	100 %	1 tahun (3 rekening x 12 bulan)	54,81	100 %
1 14 01 03	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jumlah penyedia jasa perawatan perlengkapan dan peralatan kantor selama 1 tahun anggaran.	100 %	100	100 %	100 %	100 %	10 unit komputer pc, 6 unit printer, 1 unit laptop, 1 unit fax.	0,76	100 %
1 14 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Tingkat Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan setiap tahun anggaran	100 %	100	100 %	100 %	100 %	12 laporan	70,90	100 %
1 14 01 12	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Tingkat Ketersediaan peralatan kebersihan kantor sesuai Rencana Kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	29,49	100 %
1 14 01 15	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai Rencana Kebutuhan setiap tahun anggaran.	100 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	67,96	100 %
1 14 01 23	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah serta peraturan perundang-undangan) setiap tahun anggaran.	100 %	47,85	100 %	100 %	100 %	7 media	54,15	100 %
1 14 01 24	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Persentase Tingkat keikutsertaan Aparat Dinas Ketenagakerjaan dalam kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (minimal 5 Tk. Nasional, 10 Tk. Propinsi, 12 Tk. Kabupaten) setiap tahun anggaran	100 %	99,98	100 %	100 %	100 %	100 %	81,06	100 %
1 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata Cakupan Realisasi peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pengawasan sesuai perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur setiap tahun anggaran	100 %	97,62	100 %	100 %	100 %	100 %	65,13	100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 14 02 05	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	- Persentase pemeliharaan rutin berkala gedung kantor selama 1 tahun berjalan.	100 %	100	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %
1 14 02 09	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran, berupa: - Sepeda motor	-	-	-	-	-	-	-	100 %
1 14 02 10	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.	Pemeliharaan kendaraan operasional sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran, berupa: - mobil - motor	100 % (5 Unit) - 2 mobil - 3 motor	90,63	100 % (8 Unit) - 3 mobil - 5 motor	100 % (8 Unit) - 3 mobil - 5 motor	100 % (8 Unit) 3 mobil 5 motor	100 % (5 Unit) - 2 mobil - 3 motor	51,50	100 %
1 14 02 22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor guna mendukung pelaksanaan program kegiatan kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	2 unit ac split	-	-	-	-	2 unit ac split	12,87	100 %
1 14 02 24	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor guna mendukung pelaksanaan program kegiatan kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	5 unit komputer pc 5 unit printer 3 unit laptop	100	-	-	-	5 unit komputer pc 5 unit printer 3 unit laptop	0	100 %
1 14 02 28	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur gedung kantor guna mendukung pelaksanaan program kegiatan kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	-	-	-	-	-	-	0	100 %
1 14 06	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur Dinas Ketenagakerjaan setiap tahun anggaran	100 %	35,06	100 %	100 %	100 %	100 %	28,0	100 %
1 14 06 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah jumlah pegawai/aparat Dinas Ketenagakerjaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur setiap tahun anggaran	4 orang	35,06	3 orang	3 orang	100 %	4 orang	28,0	100 %
1 14 14	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah tersedianya dokumen acuan pelaksanaan dan realisasi serta evaluasi pencapaian program dan kegiatan.	100 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	40,42	100 %
1 14 14 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen acuan pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan setiap tahun anggaran.	3 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100 %	3 dokumen	38,89	100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018				
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1	14	14	05	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat SKPD setiap tahun anggaran	5 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100 %	5 dokumen	41,59	100 %
1	14	21		Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Persentase peningkatan tenaga kerja terlatih serta peningkatan mutu lembaga pelatihan kerja	100 %	99,97	100 %	100 %	100 %	100 %	64,78	100 %
1	14	21	01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.	Jumlah jumlah pencari kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kejuruan	576 orang ( laki-laki dan perempuan)	99,97	720 orang (360 orang laki-laki 360 orang perempuan)	736 orang	100 %	576 orang ( laki-laki dan perempuan)	69,14	100 %
1	14	21	02	Pemeliharaan sarana dan prasarana BLK	Pemeliharaan gedung BLK	1 semester	100	1 semester/unit	1 unit	100 %	1 semester	0	100 %
1	14	21	03	Penilaian akreditasi lembaga pelatihan kerja	Terlaksananya penilaian akreditasi pada Lembaga Pelatihan Kerja.	4 LPK/50 orang	-	-	-	-	4 LPK/50 orang	0	100 %
1	14	21	04	Bimtek pelatihan berbasis kompetensi			-	-	-	-		0	100 %
1	14	21	05	Sosialisasi standar kompetensi kerja LPK	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi tenaga kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja.	40 orang	-	-	-	-	40 orang	27,25	100 %
1	14	21	06	Akreditasi lembaga pelatihan kerja	Terlaksananya akreditasi pada lembaga pelatihan swasta.	-	-	20 orang	20 orang	100 %	-	0	100 %
1	14	22		Peningkatan kesempatan kerja	Persetanse Realisasi Paket Standar Operasional Prosedur (SOP) / Pedoman Kebijakan Pengawasan yang disusun sesuai kebutuhan hingga Tahun Berkenaan	100 %	95,75	100 %	100 %	100 %	100 %	87,76	100 %
1	14	22	02	Sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia.	Jumlah yang mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia	185 orang	-	200 orang	200 orang	100 %	185 orang	95,40	100 %
				Pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja perempuan.	Terlaksananya pembinaan bagi kelompok usaha perempuan	-	-	4 kelompok/20 orang	4 kelompok/20 orang	100 %	-	-	100 %
				Penyusunan database tenaga kerja.	Tersedianya buku database tenaga kerja	-	-	50 buku	50 buku	100 %	-	-	100 %
				Perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri	Bimbingan teknis tentang wirausaha mandiri	20 orang	-	-	-	-	20 orang	100	100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018				
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
	Penyusunan data penempatan tenaga kerja luar negeri.	Terlaksananya pendataan data penempatan tenaga kerja luar negeri di beberapa negara	2 negara	-	-	-	-	2 negara	0	100 %			
	Peningkatan produktivitas tenaga kerja.	Terlaksananya peningklatan produktivitas tenaga kerja pada kelompok UKM	25 UKM	-	40 orang	40 orang	100 %	25 UKM	100	100 %			
	Bimtek pengukuran produktivitas tenaga kerja.	Terlaksananya pengukuran standarisasi produktivitas tenaga kerja.	30 orang	-	-	-	-	30 orang	74,61	100 %			
	Penyusunan database informasi pasar kerja.	Tersedianya informasi bursa tenaga kerja.	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %			
1	14	24	Perindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian yang memenuhi syarat untuk ditangani sesuai kewenangan setiap tahun anggaran	100 %	99,98	100 %	100 %	100 %	48,42	100 %		
1	14	24	01	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan.	Terlaksananya sosialisasi tentang pembinaan prosedur perlindungan hukum dan jamsostek	80 orang	99,93	80 orang pada perusahaan	80 orang pada perusahaan	100 %	80 orang	26,95	100 %
				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.	Pembinaan/penyuluhan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan.	-	100	100 orang	100 orang	100 %	-	-	100 %
				Sosialisasi perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.	Pembinaan/penyuluhan UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.	90 orang	-	50 orang	50 orang	100 %	90 orang	100	100 %
Keterangan : PD = Perangkat Daerah													



Realisasi Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Semester 1) - Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone

JENIS BELANJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020 (Semester 1)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA LANGSUNG</b> (Program dan Kegiatan)	<b>Rp. 2.882.500.000,-</b>	<b>Rp. 2.707.974.793,-</b>	<b>93,95 %</b>	<b>Rp. 1.575.000.000,-</b>	<b>Rp. 663.910.062,-</b>	<b>42,15 %</b>
- Belanja Barang/Jasa	<b>Rp. 3.000.000.000,-</b>	<b>Rp. 2.941.003.800,-</b>	<b>93,95 %</b>	<b>Rp. 1.575.000.000,-</b>	<b>Rp. 663.910.062,-</b>	<b>42,15 %</b>
- Belanja Modal	<b>Rp. 117.500.000,-</b>	<b>Rp. 115.300.000,-</b>	<b>98,13 %</b>	<b>Rp. 85.500.000,-</b>	<b>Rp. 11.000.000,-</b>	<b>0 %</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						
- Belanja Pegawai	<b>Rp. 3.570.417.417,-</b>	<b>Rp. 3.376.514.655,-</b>	<b>94,57 %</b>	<b>Rp. 3.745.673.617,-</b>	<b>Rp. 1.714.637.123,-</b>	<b>45,78 %</b>



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Ketenagakerjaan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel  
IKU Dinas Ketenagakerjaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten	tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	DISNAKER
		presentase penyerapan tenaga kerja yang terlatih	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja terserap terlatih}}{\text{jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	UPTD BLK dan Bidang Pembinaan
		jumlah tenaga kerja yang ditempatkan antar kerja antar lokal (AKAL)	jumlah tenaga kerja antar kerja lokal.	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan dan Bidang IPK
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan antar kerja antar daerah (AKAD)	jumlah tenaga kerja antar kerja daerah.	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan dan Bidang IPK
		jumlah pekerja migran indonesia (PMI)	jumlah pekerja migran indonesia yang terdaftar	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan
		jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada Perusahaan	jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan
	meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja	presentase peserta jamsostek aktif	$\frac{\text{jumlah peserta jamsostek aktif}}{\text{jumlah buruh/pekerja}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bidang HI
		besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB)	$\frac{\text{jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{jumlah kasus yang ditangani}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bidang HI

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone hingga Tahun 2020 (Semester 1) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2018 – 2023 , disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone hingga Tahun 2019 (Triwulan 1) dan Proyeksi Tahun 2019 dan 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 1 :Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.</b>											
01	Jumlah pencari kerja yang terlatih berbasis kompetensi dan masyarakat.	-	-	1.784 orang	1.280 orang	1.285 orang	1.290 orang	928 orang	Belum ada pemutakhirann data dikarekan program kegiatan masih sementara berjalan.	1.000 orang	1.200 orang
<p><b>Catatan Analisis :</b> Kegiatan pelatihan ini ditargetkan pada tahun 2017 melatih sekitar 1,784 orang dan realisasi pencari kerja yang dilatih pada tahun 2017 sebanyak 926 orang dengan 46 paket untuk pelatihan berbasis masyarakat dan 12 paket berbasis kompetensi. Dari pelatihan ini menyerap tenaga kerja sebanyak 360 orang baik itu bekerja pada perusahaan maupun berwirausaha sendiri. Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah sebanyak 1216 orang. Tidak tercapainya target 1,784 orang dan menurunnya jumlah peserta dibandingkan dengan tahun 2016 dikarekan jumlah paket yang tersedia sebanyak 46 paket dimana 1 paketnya dapat melatih sebanyak 16 orang, penentuan jumlah paket juga ditentukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.</p> <p>Adapun solusi yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan pencapaian sasaran ataupun inidkator jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbass kompetensi dan masyarakat ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan atau mengoptimalkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelatihan seperti penambahan jumlah peralatan yang mendukung pelatihan kejuruan.</li> <li>- Lebih mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan memberdayakan pelatih/instruktur yang ada dan mengontrak instruktur sesuaqi kebutuhan serta mengatur jadwal kegiatan pelatihan sedemikian rupa sehingga instruktur dapat diatur dengan sebaik baiknya dalam memberikan pelatihan.</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi ataupun pengumuman mengenai pelatihan yang ada dan kejururuan apa saja yang akan dilaksanakan,</li> </ul>											
<b>Sasaran 2 : Bertambahnya jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja</b>											
02	Jumlah tenaga kerja kepesertaan jamsostek	-	-	9500 orang	10.500 orang	11.000 orang	11.500 orang	22.607 orang	(Belum ada pemutakhiran data terbaru hingga bulan Maret2018)	12.000 orang	13.000 orang
<p><b>Catatan Analisis :</b> Pada tahun 2017 sebanyak 22.607 orang pada 1.470 perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dimana target yang ingin dicapai sebanyak 9500 orang. Data tersebut jauh melampaui target disebabkan karna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perubahan nomenklatur dari PT.Jamsostek dibawah naungan BUMN berali ke Badan Penyelenggara Independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.</li> <li>- Setelah beralih dari PT. Jamsostek ke BPJS kabupaten Bone mendapat prioritas sebagai Pusat pelayanan Kepesertaan Jamsostek yang mewilayahi kabupaten</li> </ul> <p>Dimana KCP (kantor cabang pembantu) berada di Kabupaten Bone.</p> <p>Adapun solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kepesertaan jamsostek yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejak adanya KCP pada saat itu pula pihak BPJS membuat MOU dengan Pemerintah Daerah tentang peningkatan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.</li> <li>- Pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga tenaga kontrak yang ada di lingkup SKPD pemerintahan Kab. Bone.</li> </ul>											
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mampu mengakses peluang kerja di dalam maupun Luar Negeri</b>											
03	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Dalam negeri : Perusahaan AKAL Luar negeri : TKI	-	-	Perusahaan : 395 orang. AKAL : 1.500 orang. TKI : o orang	Perusahaan : 395 orang. AKAL : 1.500 orang. TKI : o orang	Perusahaan : 395 orang. AKAL :1.500 orang. TKI : o	Perusahaan : 395 orang. AKAL : 1.500 orang. TKI : o orang	Perusahaan : 395 orang. AKAL : 1.500 orang. TKI : o orang	80 % (tertangani 4 dari 5 Pengaduan yang diterima hingga Maret 2018)	Perusahaan : 395 orang. AKAL :1.500 orang. TKI : o	Perusahaan : 395 orang. AKAL :1.500 orang. TKI : o



NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						orang				orang	orang
	<p><b>Catatan Analisis :</b> Penempatan pada perusahaan di tahun 2017 sebanyak 483 orang dari target 395, bisa dilihat jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sudah melampaui target yang ditentukan. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam meningkatkan kompetensi maupun kualitas para tenaga kerja melalui program dan kegiatan pelatihan yang telah di jalankan setiap tahunnya. Tetapi upaya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja harus terus ditingkatkan dikarenakan masih banyaknya jumlah pengangguran yang ada.</p> <p>Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKAL) pada tahun 2017 sebanyak 5275 orang jauh melebihi dengan yang ditargetkan sebanyak 1500 orang. Dibandingkan dengan tahun 2016 penempatan tenaga kerja antar lokal (AKAL) ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016 sebanyak 3378 orang dan di tahun 2017 sebanyak 5275 orang. Hal ini tentu sangat meningkatkan pengurangan pengangguran yang ada di kabupaten bone. Tetapi di perlukan peningkatan lebih terhadap upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Ketenagakerjaan kabupaten bone berkoordinasi dengan instansi terkait, stake holder dan perusahaan dalam mengurangi pengangguran melalui penyerapan/penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKAL).</p> <p>Penempatan tenaga kerja yang ditempatkan diluar negeri yaitu tenaga kerja indonesia (TKI) sebanyak 5 orang. Dengan target yang tertera pada RPJMD kabupaten bone yaitu sebanyak 0 orang. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri sangat banyak, tetapi sebagian besar dari TKI tersebut berangkat untuk bekerja di luar negeri tidak melalui proses ataupun prosedur yang ada, maka dari itu jumlah TKI yang terdata sangat sedikit. Maka dari itu diperlukan peran dan upaya Pemerintah dari tingkat paling atas hingga ke paling bawah untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi ataupun memfasilitasi kepada masyarakatnya mengenai penempatan tenaga kerja diluar negeri.</p>										



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditemui beberapa kendala atau permasalahan namun tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas secara umum.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- Bidang Ketenagakerjaan.

Isu strategisnya sebagai berikut :

1. Peluang dan persaingan kerja disektor swasta.
2. Kualitas tenaga kerja.
3. Pengupahan.
4. Hubungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
5. Pekerja perempuan dan anak.
6. Hubungan industrial.
7. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Isu strategis berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam waktu 5(lima) Tahun kedepan dikarenakan Kesempatan kerja, sekalipun cukup terbuka namun bekerja hanya sebagai buruh kasar baik diperusahaan perkebunan maupun pertambangan. Dan disektor perikanan laut, buruh angkut dan petani. Isu strategis berkaitan dengan kualitas tenaga kerja adalah hal yang perlu dilakukan 5(lima) Tahun kedepan dikarenakan :

1. Tingginya angka keluaran SLTP dan SLTA menjadi angkatan kerja untuk siap menjadi tenaga kerja.
2. Masih rendahnya sumber daya manusia dan keterampilan lulusan untuk masuk dunia kerja karna tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tercooper pada pekerjaan buruh kasar seperti tenaga kerja SD dan SLTP.
3. Masalah alih jasa tenaga kerja (outsourcing)
4. Pengiriman tenaga kerja keluar Negeri (TKI) yang masih bermasalah dalam penangannya.
5. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) belum berjalan maksimal.
6. Masalah wajib lapor tenaga kerja pada perusahaan belum maksimal.
7. Masalah wajib lapor lowongan kerja pada perusahaan belum maksimal



Kendala atau permasalahan Dinas Ketenagakerjaan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Proses pencairan dana kadang-kadang terlambat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
2. Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, pendidikan dan pelatihan masih terbatas
3. Keterbatasan tenaga pelatih/instruktur latihan keterampilan belum maksimal
4. Keterbatasan pejabat teknis fungsional terutama aparat tenaga pengawas ketenagakerjaan, pengantar kerja dan mediator
5. Tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga instruktur masih relatif rendah.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.



Tabel 3. Review terhadap rancangan Awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2020

PROGRAM	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tanete Rittang Barat	84 Rekening	206.008.000,00	APBD		84 Rekening	226.608.000,00	
	1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanete Riattang Barat	22 Orang	106.392.000,00	APBD		22 Orang	128.734.320,00	
	1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanete Riattang Barat	20 Jenis	8.575.000,00	APBD		20 Jenis	9.523.000,00	
	1.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tanete Riattang Barat	7 Paket	22.000.000,00	APBD		7 Paket	24.200.000,00	
	1.5	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Tanete Riattang Barat	1 Tahun	292.864.000,00	APBD		1 Tahun	292.864.000,00
	1.6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	jumlah penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Tanete Riattang Barat	49 Paket	124.955.500,00	APBD		49 Paket	137.450.000,00



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasiaonal	TR, Barat	2 Unit	55.000.000,00	APBD		2 Unit	60.500.000,00
	2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	TR. Barat	2 Unit	16.500.000,00	APBD		2 Unit	18.150.000,00
	2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	TR. Barat	9 Unit	63.300.000,00	APBD		9 Unit	104.500.000,00
	2.4	Pengadaan Mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur	TR. Barat	5 Unit	32.000.000,00	APBD		5 Unit	51.700.000,00
	2.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	TR. Barat	1 Unit	62.480.000,00	APBD		1 Unit	68.728.000,00
	2.6	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	TR. Barat	9 Unit	66.803.000,00	APBD		9 Unit	73.483.000,00
	2.7	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelahara	TR, Barat	11 Unit	3.355.000,00	APBD		11 Unit	3.750.000,00
	2.8	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	TR. Barat	26 Unit	18.315.000,00	APBD		26 Unit	20.146.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Tanete Riattang Barat	4 Orang	55.604.000,00	APBD		4 Orang	61.164.895,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen realisasi capaian kinerja yang tersusun	TR. Barat	4 Dokumen	13.442.000,00	APBD		4 Dokumen	14.764.420,00



	4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	TR.Barat	4 Dokumen	13.184.000,00	APBD		4 Dokumen	14.502.455,00
Program Penunjang Pemerintahan Umum	5.1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	TR. Barat	5 Dokumen	20.055.000,00	APBD		5 Dokumen	26.461.490,00
	5.2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah website yang dikelola	TR.Barat	1 Paket	38.500.000,00	APBD		1 Paket	42.350.000,00
	5.3	Promosi dan pameran pembangunan	jumlah pameran dan promosi pembangunan yang diikuti	TR, barat	1 Paket	11.000.000,00	APBD		1 Paket	12.100.000,00
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.1	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki dari berbagai kejuruan yang mengikuti pelatihan	27 Kecamatan	480 Orang	968.970.640,00	APBD		512 Orang	1.065.867.704,00
	6.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Blk	jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	Tanete Riattang Timur	1 Unit	27.500.000,00	APBD		1 Unit	30.250.000,00
	6.3	Bimtek Pelatihan Berbasis Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	TR. Barat	35 Orang	82.500.000,00	APBD		35 Orang	90.750.000,00
	6.4	Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah yang peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	TR. Barat	35 Orang	55.000.000,00	APBD		35 Orang	60.500.000,00
	6.5	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan	Jumlah LPK yang Mengikuti sosialisasi akreditasi lembaga pelatihan kerja	TR. Barat	21 LPK	55.000.000,00	APBD		21 LPK	60.500.000,00
	6.6	Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	TR. Timur	50 Unit	0,00	APBD		50 Unit	36.300.000,00



	6.7	Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang mendapatkan pembinaan penatausahaan dan evaluasi kegiatan lembaga pelatihan kerja	TR. Barat	10 LPK	55.000.000,00	APBD		10 LPK	60.500.000,00
	6.8	Sosialisasi Regulasi Bidang Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang mengikuti sosialisasi Regulasi bidang pelatihan kerja pada LPK	Tanete Riattang Barat	25 LPK	55.000.000,00	APBD		25 LPK	60.500.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	7.1	Bimtek Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengukuran produktivitas	Tanete Riattang Barat	35 UMKM	82.500.000,00	APBD		35 UMKM	90.750.000,00
	7.2	Job Fair Bursa Kerja	jumlah job fair bursa kerja yang dilaksanakan	Tanete Riattang	1 Paket	220.000.000,00	APBD		1 Paket	242.000.000,00
	7.3	Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah yang mengikuti Pelatihan tenaga kerja produktivitas	Tanete Riattang	25 UMKM	60.000.000,00	APBD		25 UMKM	65.000.000,00
	7.4	Penyusunan Data Base Informasi Pasar Kerja	Terciptanya data base informasi pasar kerja bagi pencari kerja	Tanete Riattang Barat	12 Laporan	33.000.000,00	APBD		12 Laporan	36.300.000,00
	7.4	Monitoring Evaluasi Penempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah data penempatan dan penyerapan tenaga kerja bagi pencari kerja	27 Kecamatan	450 Orang	249.700.000,00	APBD		450 Orang	274.670.000,00
	7.6	Pemberdayaan Tenaga Kerja AKL/ AKAD	Sosialisasi bagi calon tenaga kerja indonesia		450 Orang	249.700.000,00	APBD		450 Orang	274.670.000,00
	7.7	Pembinaan Purna Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan wirausaha mandiri bagi purna Tenaga	Tanete Riattang Barat	20 orang	79.173.600,00	APBD		20 orang	87.090.960,00



Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	8.1	Bimtek Penyusunan SUSU (Struktur Skala Upah)	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan struktur skala upah di perusahaan	Tanete Riattang Barat	50 Perusah aan	80.000.000,00	APBD		50 Perusahaa n	90.000.000,00
	8.2	Pembinaan dan Penyelesaian HI (Hubungan Industrial)	jumlah kasus yang ditangani melalui pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Tanete Riattang Barat	16 Orang	60.000.000,00	APBD		17 Orang	65.000.000,00
	8.3	Pembinaan Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa n	jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi tentang pembinaan prosedure perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Tanete Riattang Barat	80 Orang	100.000.000,00	APBD		100 Orang	110.000.0 00,00
						<b>3.743.376.740,00</b>				<b>4.192.328.744,00</b>

Catatan penting yang disajikan terkait penjelasan sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang dirumuskan.



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di bidang ketenagakerjaan Kab. Bone. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone selalu mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung melalui musrenbang mengenai peningkatan keterampilan dan produktifitas masyarakat agar dapat diberdayakan menjadi tenaga kerja yang kompeten, program dan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut selalu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.

Namun demikian, Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, tetap mengamati isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengaduan masyarakat yang oleh Dinas Ketenagakerjaan dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan dan penugasan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).



## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transigrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan Kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai Program Prioritas yang terdiri dari Prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan Prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kontrak kinerja menteri melalui 6 (enam) Program Teknis dan 3 (tiga) Program Pendukung.

#### **3.1.1. Bidang Tenaga Kerja.**

Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2018 – 2023 diarahkan untuk :

- a. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik, yaitu lapangan kerja Produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai.
- b. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan.
- c. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industri untuk mendorong kesempatan kerja.
- d. Menyempurnakan Peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan Pokok (utama) sesuai hukum Internasional.
- e. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja.
- f. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas.
- g. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program Pemerintah.
- h. Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan.
- i. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Memasuki Pembangunan Tahun 2018 - 2023, pembangunan dibidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan antara lain :

1. Tingginya tingkat pengangguran karena meningkatnya angkatan kerja pertahun
2. Rendahnya perluasan kesempatan kerja.
3. Rendahnya kompetisi dan produktivitas tenaga kerja.
4. Belum kondusifnya kondisi hubungan industri.



Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah menyusun program dan kegiatan.

Telaahan mengenai Renstra kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan :
  - a. Pelatihan Kewirausahaan.
  - b. Pengembangan Standardisasi Kompetisi kerja dan Program Peatihan.
  - c. Peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga kepelatihan.
  - d. Pengembangan dan peningkatan Produktivitas.
  - e. Peningkatan penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri.
  - f. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan pelatihan dan produktivitas.
  - g. Pengembangan sistem dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi.
  - h. Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja.
  - i. Pelaksanaan dan peningkatan Produktivitas.
  - j. Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja dan Pengembangan Program Pelatihan bidang Ketenaga kerjaan.
  - k. Peningkatan kualitas Transmigran dan calon Transmigran.
  - l. Pengembangan Program dan peningkatan kapasitas SDM Pelatihan Ketransmigrasian.
  - m. Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga kerja.
  - n. Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja bidang Industri.
  - o. Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembina Pelatihan dan Produktivitas.
  - p. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Nasional sertifikasi Profesi.

Program ini bertujuan untuk peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja, untuk mencetak Tenaga kerja dan Wirausaha baru yang berdaya saing, untuk mendukung program ini Bidang Tenaga kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam Renstra 2018 – 2023 telah menyusun Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja beserta kegiatannya.

Indikator kinerja dari dari Program ini adalah meningkatnya daya saing dan Produktivitas tenaga kerja, yang diukur melalui.

- Jumlah standar kompetisi dan program yang telah disusun.
- Jumlah lembaga pelatih dan Produktivitas yang dikembangkan.
- Jumlah peserta Pemagangan dalam dan luar Negeri.
- Jumlah Instruktur dn tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya.



- Jumlah Tenaga kerja dan transmigrasi yang dilatih.
- Jumlah lembaga/organisasi dan masyarakat yang ditingkatkan produktivitasnya.

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja, dengan kegiatan.

- Penempatan tenaga kerja dalam Negeri.
- Pembinaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri
- Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan pengembangan pasar kerja.
- Peningkatan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan tenaga kerja.

Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan kerja baik didalam maupun diluar Negeri. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam Renstra 2018 – 2023 telah menyusun program Peningkatan Kesempatan Kerja beserta kegiatannya.

Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui :

- a. Jumlah penempatan tenaga kerja.
- b. Jumlah Lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan, dengan kegiatan meliputi :

- a. Sosialisasi peraturan-peraturan Ketenagakerjaan.
- b. Pengelolah kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan Industri.
- c. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan Industrial.
- d. Konsolidasi peningkatan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja yang lebih baik.
- e. Konsolidasi pembinaan Syarat-syarat kerja Non Diskriminasi.
- f. Peningkatan penerapan Norma Ketenaga kerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja.



- g. Peningkatan peran serta lembaga-lembaga dan personil dalam penerapan Norma ketenaga kerjaan.
- h. Peningkatan penerapan keselamatan dan keehatan kerja.
- i. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.
- j. Dukungan manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan.

Indikator kinerja Program perlindungan dan pengembangan ketenaga kerjaan adalah meningkatnya pembinaan hubungan industri dan jaminan sosial Tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian hubungan industrial serta meningkatnya penerapan perturan Perundang-undangan ketenaga kerjaan ditempat kerja, yang diukur dari :

- Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek.
- Persentase Kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator.
- Jumlah lembaga kerja sama Bipartif yang dibentuk.
- Jumlah lembaga kerja sama Tripartif yang dibentuk.
- Jumlah peraturan Perusahaan yang disahkan.
- Jumlah perjanjian kerja sama yang didaftarkan.
- Jumlah wajib lapor ketenaga kerjaan yang didaftarkan.
- Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselaman dan Kesehatan Kerja (SMK 3).
- Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi.
- Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja perempuan.
- Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk mendukung program ini bidang hubungan industrial dan Jamsostek serta bidang Pembina Pengawasan Ketenaga kerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam Renstra 2018 – 2023 telah menyusun program perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenaga kerjaan beserta kegiatannya.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut:

#### **1. Tujuan :**

Tujuan dari Pembangunan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

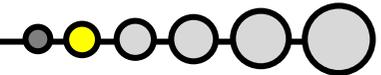
- a. Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja daerah.



2. Sasaran :

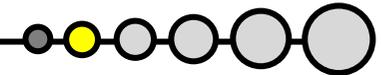
- a. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten.
- b. Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja.

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2020, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2021 – Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja daerah.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten.	Tingkat pengangguran terbuka	3,90 %	- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.</li> <li>• Pemeliharaan sarana dan prasarana BLK.</li> <li>• Bimtek pelatihan berbasis kompetensi.</li> <li>• Sosialisasi standar kompetensi kerja LPK</li> <li>• Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan</li> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja</li> <li>• Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan LPK</li> <li>• Sosialisasi Regulasi Bidang Pelatihan Kerja</li> </ul> - Program peningkatan kesempatan kerja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek pengukuran produktifitas tenaga kerja.</li> <li>• JOB fair Bursa kerja.</li> <li>• Peningkatan produktifitas tenaga kerja</li> <li>• Penyusunan database tenaga kerja.</li> <li>• Monitoring Evaluasi Penempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja</li> <li>• Pemberdayaan Tenaga Kerja AKL/AKAD</li> <li>• Pembinaan Purna Tenaga Kerja Indonesia</li> </ul>
		Persentase penyerapan tenaga kerja terlatih	63,3 %	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan antar kerja antar lokal. (AKAL)	5995 orang	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan antar kerja daerah. (AKAD)	380 orang	
		Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)	27 orang	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada perusahaan.	871 orang	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja. mengakses peluang kerja di dalam dan luar negeri.	Persentase peserta jamsostek aktif	75,86%	- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek penyusunan SUSU (struktur skala upah)</li> <li>• Pembinaan dan penyelesaian perselisihan HI ( hubungan industrial)</li> <li>• Pembinaan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hokum dan jaminan social ketenagakerjaan.</li> </ul>
		Besaran kasun yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	100 %	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan urusan ketenagakerjaan.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan urusan ketenagakerjaan	Nilai SAKIP oleh APIP	BB	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **RENCANA PROGRAM**

#### 1. Bidang Ketenagakerjaan

Fokus arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diimplementasikan dalam bentuk program prioritas utama , meliputi :

- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan .
- Program peningkatan kesempatan kerja.  
Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal.
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan .  
Program ini bertujuan untuk memperbaiki syarat kerja dan sistem pengupahan , pemberedayaan lembaga hubungan industrial .

#### 2. Bagian Kesekretariatan

- Program pelayanan administrasi perkantoran  
Tujuan program ini meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran .
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur .  
Program ini bertujuan sebagai upaya peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan prasarana gedung dan peralatan kantor .
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur .
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .
- Program penunjang pemerintahan umum.

### **KEGIATAN**

#### 1. Bidang Ketenagakerjaan

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencaker sumber dananya APBD II
- Pemeliharaan sarana dan prasarana BLK sumber dananya APBD II
- Bimtek pelatihan berbasis kompetensi sumber dananya APBD II



- Sosialisasi standarisasi kompetensi kerja lembaga pelatihan kerja sumber dananya APBD II
  - Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan sumber dananya APBD II
  - Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi pencari kerja sumber dananya APBD II
  - Pembinaan penatausahaan dan evaluasi kegiatan Lembaga Latihan kerja sumber dananya APBD II
  - Sosialisasi Regulasi Bidang Pelatihan Kerja sumber dananya APBD II
  - Bimtek pengukuran produktifitas tenaga kerja sumber dananya APBD II
  - JOB FAIR bursa tenaga kerja sumber dananya APBD II
  - Sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja indonesia sumber dananya APBD II
  - Peningkatan produktifitas tenaga kerja sumber dananya APBD II
  - Penyusunan database informasi pasar kerja sumber dananya APBD II
  - Monitoring evaluasi penempatan dan penyerapan tenaga kerja sumber dananya APBD II.
  - Pemberdayaan tenaga kerja AKL/AKAD sumber dananya APBD II.
  - Pembinaan purna tenaga kerja Indonesia sumber dananya APBD II.
  - Bimtek penyusunan struktur skala upah (SUSU) sumber dananya APBD II
  - Pembinaan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sumber dananya APBD II
  - Pembinaan prosedur perlindungan hokum dan jaminan social ketenagakerjaan sumber dananya APBD II
2. Bagian Kesekretariatan
- Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik sumber dananya APBD II
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan, sumber dananya APBD II
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor , sumber dananyaq APBD II
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan sumber dananya APBD II
  - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah . sumber dananya APBD II
  - Pelaksanaan administrasi perkantoran, sumber dananya APBD II
  - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor sumber dananya APBD II
  - Pengadaan peralatan gedung kantor



- Pengadaan mebeleur gedung kantor
- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor sumber dananya APBD II
- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas sumber dananya APBD II
- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor.
- Pendidikan dan pelatihan formal sumber dananya APBD II
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sumber dananya APBD II
- Penyusunan laporan keuangan semesteran sumber dananya APBD II
- Penyusunan rencana perangkat daerah.
- Pengelolaan website perangkat daerah.
- Promosi dan pameran pembangunan

#### 4.a Dana Indikatif

##### I. Bidang Ketenagakerjaan

##### 1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan , keahlian , kompetensi dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan kewirausahaan .

No.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2021
1	Terwujudnya pelatihan pencari kerja perempuan dan laki-laki dari berbagai kejuaruan	Rp. 1.065.8864.640,-
2	Terpeliharanya Sarana dan prasarana BLK	Rp. 30.250.000,-
3	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	Rp. 90.750.000,-
4	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi standar kompetensi kerja lembaga	Rp. 60.500.000,-
5	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 60.500.000,-
6	Jumlah pembinaan penatausahaan dan evaluasi Kegiatan LPK	Rp. 60.500.000,-
7	Jumlah LPK yang mengikuti sosialisasi Regulasi Bidang pelatihan kerja pada LPK	Rp. 60.500.000,-
8	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan persiapan Uji Kompetensi pada lembaga pelatihan kerja	Rp. 57.500.000,-



**2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Program ini bertujuan untuk mendorong kesempatan kerja produktivitas dan mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran baik dipedesaan maupun diperkotaan .

No.	URAIAN	Estimasi Anggaran th.2021
1	Jumlah Kelompok Usaha produktif yang mendapatkan pembinaan tenaga kerja mandiri	Rp. 83.694.000 ,-
2	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengukuran produktifitas	Rp. 90.750.000,-
3	Jumlah job fair bursa kerja yang dilaksanakan	Rp. 242.000.000 ,-
4	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bagi calong PMI	Rp. 274.670.000,-
5	Jumlah laporan hasil monitoring pelatihan tenagakerja produktifitas	Rp. 61.655.550,-
6	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan tenaga kerja AKL/ AKAD	Rp. 24.200.000,-
7	Jumlah laporan informasi pasar kerja online	Rp. 90.750.000,-
8	Jumlah paserta yang mengikuti sosialisasi pelayanan informasi pasar kerja	Rp. 30.250.000,-
9	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan melaksanakan pengembangan produktifitas	Rp. 66.550.000,-
10	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kader produktifitas	Rp. 66.550.000,-

**3. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.**

Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat – syarat kerja dan sistem pengupahan , pemberdayaan lembaga Hubungan Industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja/pengusah.



No.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2021
1	Jumlah kasus yang ditangani melalui pembinaan dan penyelesaian perselisihan HI	Rp. 65.000.000,-
2	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi tentang pembinaan prosedur perlindungan hokum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Rp. 110.000.000,-
3	Jumlah Perusahaan yang terdata	Rp.90.000.000,-

## II. Kesekretariatan

### 1. Program pelayanan administrasi Perkantoran

No.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th. 2021
1.	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, air, listrik, telepon/fas dan wifi	Rp. 226.608.000,-
2.	Jumlah tenaga jasa administrasi dan jasa teknis lainnya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang disertai pemberian asuransi jaminan kesehatan	Rp. 129.792.000,-
3.	Jumlah peralatan kebersihan kantor	Rp. 9.522.500,-
4.	Jumlah Bahan Bacaan dan perundangan	Rp. 24.200.000,-
5.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp. 322.150.000,-
6.	Jumlah aitem/jenis alat tulis kantor (ATK) barang cetakan dan penggandaan serta makan dan minum	Rp. 137.450.000,-

### 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2021
1.	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Rp. 18.150.000,-
2.	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Rp. 100.730.000,-
3.	Jumlah pengadaan mabeleur, kursi future, meja biro, kursi pimpinan dan gorden	Rp.25.000.000,-



4.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Rp.68.728.000,-
5.	Jumlah kendaraan dinas operasional mobil dan motor yang dipeliharakan	Rp.73.483.000,-
6.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Rp.3.390.000,-
7.	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan gedung kantor, laptop, komputer, printer	Rp.20.146.000,-

### 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2021
1	Jumlah Apartur yang mengikuti kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis	Rp. 61.164.000,-
2	Jumlah Apartur yang mengikuti bimbingan teknis	Rp. 65.000.000,-

### 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th. 2021
1.	Jumlah dokumen acuan pelaksanaan realisasi program dan kegiatan LAKIP, LPPD/LKPJ, Evaluasi Renja	Rp.14.764.000,-
2.	Jumlah bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat SKPD.	Rp.14.502.000,-

### 5. Program Penunjan Pemerintahan Umum

No.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th. 2021
1.	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA	Rp. 26.461.000,-
2.	Jumlah pemeliharaan website	Rp. 42.350.000,-
3.	Terlaksananya pameran pembangunan	Rp. 12.100.000,-



Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022. Selain itu ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone.

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini ;



Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 – Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone

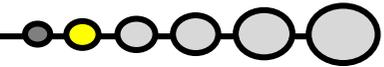
NO	PROGRAM	KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi air, Listrik dan telepon fax/wifi	Tanete Riattang Barat	84 Rekening	226.608.000,00	DAU		Rekening	249.269.000,00
		1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi dan jasa teknis lainnya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang disertai pemberian asuransi jaminan kesehatan	Tanete Riattang Barat	22 Orang	129.792.000,00	DAU		Orang	141.607.000,00
		1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang di pelihara	Tanete Riattang Barat	20 Paket	9.522.500,00	DAU		Paket	10.475.000,00
		1.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanete Riattang Barat	7 Media	24.200.000,00	DAU		Media	26.620.000,00
		1.5	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Tanete Riattang Barat	1 Tahun	322.150.000,00	DAU		Tahun	354.365.000,00
		1.6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Tanete Riattang Barat	49 Paket	137.450.000,00	DAU		Paket	151.195.000,00



(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Tanete Riattang Barat	2 Paket	18.150.000,00	DAU		Paket	19.965.000,00
		2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Tanete Riattang Barat	4 Paket	100.720.000,00	DAU		Paket	126.445.000,00
		2.3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Tanete Riattang Barat	4 Paket	25.000.000,00	DAU		Paket	62.557.000,00
		2.4	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemeliharaan gedung kantor	Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	68.728.000,00	DAU		Kegiatan	75.600.000,00
		2.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Tanete Riattang Barat	11 Paket	73.483.000,00	DAU		Paket	80.831.000,00
		2.6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Tanete Riattang Barat	13 Paket	3.390.000,00	DAU		Paket	4.050.000,00
		2.7	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Tanete Riattang Barat	4 Paket	20.146.000,00	DAU		Paket	22.161.000,00
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	3.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Tanete Riattang Barat	2 Orang	61.164.000,00	DAU		Orang	67.281.000,00
		3.2	Bimbingan Teknis	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Tanete Riattang Barat	5 Orang	65.000.000,00	DAU		Orang	70.000.000,00
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)



4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi capaian kinerja yang tersusun	Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	14.764.000,00	DAU		Dokumen	16.240.000,00
		4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	Tanete Riattang Barat	5 Laporan	14.502.000,00	DAU		Laporan	15.962.000,00
5	Program Penunjang Pemerintahan Umum	5.1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	Tanete Riattang Barat	6 Dokumen	26.461.000,00	DAU		Dokumen	29.107.000,00
		5.2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan website yang dikelola	Tanete Riattang Barat	1 Website	42.350.000,00	DAU		1 Website	46.585.000,00
		5.3	Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah pameran dan promosi pembangunan yang diikuti	Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	12.100.000,00	DAU		Kegiatan	13.100.000,00
6	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.1	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki dari berbagai kejuruan yang mengikuti pelatihan	27 Kecamatan	512 Orang	1.065.864.640,00	DAU		Orang	1.172.454.474,00
		6.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Blk	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	Tanete Riattang Timur	1 Unit	30.250.000,00	DAU		Unit	33.275.000,00
		6.3	Bimtek Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	Tanete Riattang Barat	35 Orang	90.750.000,00	DAU		Orang	99.825.000,00
		6.4	Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Tanete Riattang Barat	35 Orang	60.500.000,00	DAU		Orang	66.550.000,00
		6.5	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan	Jumlah LPK yang Mengikuti sosialisasi akreditasi lembaga pelatihan kerja	Tanete Riattang Barat	21 LPK	60.500.000,00	DAU		LPK	66.550.000,00
		6.6	Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang mendapatkan pembinaan penatausahaan dan evaluasi kegiatan lembaga pelatihan kerja	Tanete Riattang Barat	10 LPK	60.500.000,00	DAU		LPK	66.550.000,00



		6.7	Sosialisasi Regulasi Bidang Pelatihan Kerja	Jumlah sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja pada LPK	Tanete Riattang Barat	1 LPK	60.500.000,00	DAU		LPK	60.550.000,00
		6.8	Pelatihan Persiapan Uji Kompetensi Instruktur LPK di Kabupaten Bone	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan persiapan Uji Kompetensi pada lembaga pelatihan kerja	Tanete Riattang Barat	35 Orang	57.500.000,00	APB D		Orang	60.000.000,00
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	7.1	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah kelompok usaha produktif yang mendapatkan pembinaan tenaga kerja mandiri		1 Kelompok	83.694.000,00	DAU		Kelompok	63.888.000,00
		7.2	Bimtek Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengukuran produktivitas	Tanete Riattang Barat	35 Orang	90.750.000,00	DAU		Orang	99.825.000,00
		7.3	Job Fair Bursa Kerja	Jumlah job fair bursa kerja yang dilaksanakan	Tanete Riattang	1 Kegiatan	242.000.000,00	DAU		Kegiatan	266.200.000,00
		7.4	Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi bagi calon pekerja migran indonesia indonesia	3 Kecamatan	450 Orang	274.670.000,00	DAU		450 Orang	302.137.000,00
		7.5	Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah yang mengikuti Pelatihan tenaga kerja produktivitas	Tanete Riattang	25 UMKM	65.000.000,00	DAU		UMKM	70.000.000,00
		7.6	Monitoring Evaluasi Penempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penempatan dan penyerapan tenaga kerja	27 Kecamatan	12 Laporan	61.655.550,00	DAU		12 Laporan	67.821.105,00
		7.7	Pemberdayaan Tenaga Kerja AKL/ AKAD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan tenaga kerja AKL / AKAD	Tanete Riattang Barat	20 Orang	24.200.000,00	DAU		20 Orang	26.620.000,00
		7.8	Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan informasi pasar kerja online	Tanete Riattang Barat	12 Laporan	90.750.000,00	DAU		Laporan	99.825.000,00
		7.9	Sosialisasi Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelayanan informasi pasar	Tanete Riattang Barat	25 Perusahaan	30.250.000,00	DAU		Perusahaan	33.275.000,00



				kerja							
		7.10	Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Produktifitas	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan melaksanakan pengembangan produktivitas	Tanete Riattang Barat	30 Orang	66.550.000,00	DAU		Orang	73.205.000,00
		7.11	Pelatihan Kader Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kader Produktivitas	Tanete Riattang Barat	30 Orang	66.550.000,00	DAU		30 Orang	73.205.000,00
8	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	8.1	Pembinaan dan Penyelesaian HI (Hubungan Industrial)	Jumlah kasus yang ditangani melalui pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Tanete Riattang Barat	17 Kasus	65.000.000,00	DAU		Kasus	70.000.000,00
		8.2	Pembinaan Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi tentang pembinaan prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Tanete Riattang Barat	100 Orang	110.000.000,00	DAU		Orang	120.000.000,00
		8.3	Pendataan HI dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang terdata	Tanete Riattang Barat	40 Perusahaan	90.000.000,00	DAU		Perusahaan	100.000.000,00
							<b>4.243.114.690,00</b>				<b>4.675.170.579,00</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tahun 2021 secara umum maupun secara khusus disusun sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bone tahun 2020 dan juga dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan pada RENSTRA tahun 2018-2023

Hasil pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan akan dijadikan sebagai bahan untuk mengendalikan program dan kegiatan serta selanjutnya memberikan solusi yang efektif dan berkualitas dalam rangka perbaikan kinerja dinas secara keseluruhan. Dan hal ini dijadikan sebagai acuan dalam rangka penetapan Rencana kerja tahun berikutnya, disamping itu juga akan menjadi acuan bagi Kepala Dinas untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada aparat pada lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone serta penyampaian laporan kinerja kepada Bupati Bone.

Perlu disadari bahwa dengan semakin bertambahnya wirausaha baru dan bertambahnya pencari kerja akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Untuk itu penyelesaiannya harus secara bertahap dan komprehensif oleh seluruh staf Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bone dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.

Kami menyadari, bahwa penyusunan rencana kerja ini belum sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami senantiasa mengharapkan masukan dari segenap yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :



## **Hambatan dan Permasalahan**

### **1. Aspek Pemerintahan**

- Belum maksimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsinya
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pelatihan
- Masih kurangnya tenaga instruktur/pelatih dan tenaga pengawas ketenagakerjaan serta tenaga pengawasan ketenagakerjaan serta tidak adanya mediator dan pengantar kerja.
- Belum memadainya sistem informasi dan komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat serta dukungan pihak terkait dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan.
- Semakin besarnya tuntutan dan dinamika masyarakat dalam pemenuhan segala aspek kehidupan dalam hal mencapai kehidupan yang layak.
- Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten dalam hal pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran.
- Keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan dunia usaha baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.

### **2. Aspek Dunia Usaha**

- Masih rendahnya kepekaan dan daya tangkap masyarakat terhadap peluang usaha dan kebutuhan pasar dalam penciptaan wirausaha baru.
- Rendahnya kemampuan mengakses informasi pasar kerja terutama pada sektor industri
- Pelaksanaan jaringan usaha dan pola kemitraan belum berjalan optimal
- Masih banyaknya pengusaha yang belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah sesuai dengan norma kerja
- Komitmen perwujudan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah belum optimal, hal ini disebabkan oleh dominasi pengusaha yang besar.
- Persaingan dunia usaha semakin meningkat akan tetapi fluktuasi praktek monopoli kegiatan usaha semakin berkembang.



### **3. Aspek Masyarakat**

- Tingginya angka pengangguran
- Jiwa wirausaha yang lemah
- Kurangnya investasi yang memberikan lowongan pekerjaan
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pasar
- Masih rendahnya pemanfaatan potensi lokal masyarakat dalam hal pembinaan pemberdayaan tenaga kerja
- Masih rendahnya budaya dan etos kerja pada sebagian masyarakat sehingga berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran
- Masih adanya pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa bekerja adalah menjadi pegawai negeri.
- Semakin tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.
- Semakin besarnya tuntutan dan dinamika masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara luas.

### **4. Pemecahan Masalah**

Untuk menyikapi permasalahan ketenagakerjaan tersebut di atas, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sebagai langkah solutif atas permasalahan/hambatan tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian khusus dari aspek pembiayaan dan pengupayaan peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui bimbingan teknis aparat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan memberdayakan tenaga pelatih/instruktur yang ada dan mengontrak instruktur sesuai kebutuhan serta mengatur jadwal kegiatan pelatihan sedemikian rupa sehingga instruktur yang ada dapat diatur dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelatihan.
3. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terhadap kekurangan pegawai khususnya tenaga pengawasan, mediator, pengantar kerja dan instruktur sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
4. Mengadakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja terhadap program kelembagaan dan perlindungan ketenagakerjaan
5. Melaksanakan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi, masyarakat dan berbasis kewirausahaan berdasarkan sumber daya alam suatu wilayah dan sumber daya manusia.



6. Menginventarisir pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan keterampilan dari berbagai jenis kejuruan sebagai tenaga kerja siap pakai.
7. Meningkatkan koordinasi pada instansi terkait, stake holder dan perusahaan untuk penyerapan tenaga kerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan